

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Sebuah negara harus melakukan proses pembangunan agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan yang bersifat terikat dan memaksa. Agar kebijakan tersebut dapat menunjang keberhasilan pembangunan maka diperlukan pemahaman kebijakan publik lebih mendalam. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dalam hal ini pentingnya pemerintah memastikan seberapa efektif program yang telah dibentuk (Desrinelti, 2021).

Kebijakan publik merupakan suatu upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah. Selain itu kebijakan publik guna mengetahui apa yang menyebabkan atau yang memengaruhinya serta apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut (Budiman et al., 2019).

Kebijakan publik dapat memiliki arti sebagai sebuah rangkaian keputusan yang saling mempunyai pengaruh yang dibentuk oleh badan serta pejabat-pejabat dalam pemerintah. Sebuah kebijakan mempunyai keterikatan dalam proses mengambil keputusan yang memiliki tujuan demi melanjutkan dari tindakan yang akan dilaksanakan. Adapun kebijakan publik dapat diartikan menjadi sebuah keputusan yang diberikan oleh pemegang otoritas publik yang posisinya melibatkan banyak orang. Dalam hal ini kebijakan publik sebaiknya dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang(Anggara, 2021)

James Anderson (2020) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu

seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari berbagai pengertian tentang kebijakan publik diatas, dinyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang sedang terjadi. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa membentuk suatu program sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Selain itu pemerintah juga perlu mengamati kembali apakah program tersebut efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada.

2.1.2 Prinsip-prinsip Kebijakan Publik

Pada umumnya, pengertian kebijakan publik yaitu sebuah ketetapan yang memberikan aturannya adalah pemerintah yang memiliki tujuan tertentu. Dalam penyusunan serta pencapaian yang efektif dalam kegiatan pemerintahan, untuk itu prinsip-prinsip kebijakan publik tersebut dipergunakan dalam dasar dari seluruh pengurusan pemerintahan.

Demi terwujudnya kebijakan yang efektif serta efisien maka konsep untuk pengelolaan kebijakan publik yaitu :

1. Formulasi kebijakan, yang artinya cara untuk merumuskan kebijakan publik
2. Adanya tata cara dalam melakukan implementasi kebijakan publik
3. Adanya tata cara untuk melakukan evaluasi kebijakan publik.

Adanya kebijakan publik di jaman yang modern ini mempunyai fokus utama yaitu suatu prioritas dari pencapaian negara terhadap pertahanan serta peningkatan kualitas hidup lebih diutamakan dan diunggulkan. Bukan hanya itu kebijakan publik juga berfokus pada mengakomodasi berbagai kepentingan dan menyatukan kepentingan yang banyak untuk mencapai prioritas dan urgent dalam menata kepentingan yang lebih umum.

Selanjutnya menurut (Anggara, 2021) kebijakan menjadi suatu konsep meliputi beberapa hal berikut ini :

1. Ketetapan, ketentuan-ketentuan yang memiliki pengaruh mengikat pada suatu kebijakan.

2. Maksud, terciptanya suatu kebijakan ialah untuk mencapai tujuan tertentu serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.
3. Keputusan yang bisa dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan suatu kepentingan.
4. Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan.

2.1.3 Tujuan Kebijakan Publik

Adanya kebijakan harusnya dapat memberi solusi dari masalah yang ada saat ini. Selain daripada itu, kebijakan juga menjadi solusi dari masalah yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan memiliki tujuan dalam menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi saat ini, tidak hanya dalam pemecahan permasalahan dengan membentuk yang baru. Tetapi adanya kebijakan publik ini, masalah yang sedang terjadi bisa diselesaikan selain itu juga dapat menjadi jawaban dari masalah yang ada. Kebijakan publik terlihat dari adanya beberapa alternatif yang dibentuk pada kebijakan itu. (Abdal, 2022)

Kebijakan publik dapat diorganisasikan dalam mendorong tercapainya maksud yang telah ditetapkan. Pada dasarnya kebijakan publik diterapkan demi tujuan untuk mengendalikan kehidupan keseluruhan. Dari perspektif yang efektif, kebijakan menjadi alat dalam tercapainya tujuan dalam membentuk beberapa nilai publik. Adanya beragam wujud nilai kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Nilai ideal pada masyarakat, misalnya adanya keadilan, terdapat kesetaraan, serta keterbukaan,
2. Penyelesaian permasalahan yang terjadi pada masyarakat, misalnya kemiskinan yang ada, pengangguran serta buruknya penyediaan layanan pelayanan publik,
3. Adanya manfaat peluang terbaru bagi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, misalnya terdorong untuk investasi, inovasi layanan, serta peningkatan dalam ekspor,
4. Adanya perlindungan terhadap masyarakat dari praktik swasta yang akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, misalnya dengan terlaksananya undang-undang perlindungan konsumen.

Bentuk dari tujuan kebijakan publik bisa seperti politik, ekonomi, sosial ataupun hukum. Jika dilihat dari segi politis, kebijakan publik dibentuk dalam distribusi serta alokasi nilai, dapat berbentuk barang dan jasa, untuk seluruh anggota masyarakat. Dengan adanya kekuasaan, kebijakan publik dibentuk untuk pemerintah dapat mempertahankan monopolinya terhadap masyarakat serta kekuasaan pemerintah dapat diakui serta diterima masyarakat. (Affrian, 2021)

Dari segi ekonomi, kebijakan publik dibuat untuk tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan dukungan serta memberikan fasilitas pasar supaya melaksanakan tugasnya dengan kompetitif dalam mengendalikan perputaran perekonomian,
2. Adanya jaminan bahwa aktivitas perekonomian dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari manapun,
3. Melunakkan perekonomian, serta mempermudah perputaran perekonomian dalam melaksanakan aktivitas produksi, konsumsi serta distribusi,
4. Adanya jaminan serta terlindunginya kepentingan rakyat yang tanpa kemampuan kapitalis kekuasaan.

Dari segi sosial, kebijakan publik dibuat untuk beberapa alasan yaitu:

1. Mengendalikan sosial terhadap masyarakat,
2. Memberikan solusi atas permasalahan sosial yang ada di masyarakat,
3. Hubungan sosial dengan anggota masyarakat dengan tidak adanya diskriminasi.

Dari sudah pandang hukum, kebijakan publik dapat dirumuskan kegunaannya sebagai berikut:

1. Menciptakan keadilan serta adanya ketertiban hukum terhadap masyarakat,
2. Adanya peluang bagi masyarakat untuk mengerti serta menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
3. Membangun keadaan damai dalam kehidupan masyarakat.

2.1.4 Kriteria Kebijakan Publik

Kriteria dalam Kebijakan Publik merupakan suatu pokok penting untuk dapat menetapkan sebuah rancangan pemikiran dalam mewujudkan kebijakan publik yang akan diperoleh masyarakat. Dalam bab ini kebijakan publik merupakan objek

utama pembahasan dimana akan menjadi sebuah aspek yang akan dilaksanakan masyarakat. Selanjutnya penting untuk mengetahui sebelumnya kriteria yang akan menjadi penentu dalam kebijakan publik ini. Beberapa kriteria yang ada dalam ketertarikan publik diantaranya keadilan, efisiensi, dan efektifitas, cukup dan terjawab (Muhammadiyah, 2021)

1. Ketertarikan Publik

Masyarakat merupakan objek utama untuk menerapkan kebijakan tersebut, diperlukan adanya penunjang serta menjalankan suatu kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah. Adanya kesulitan untuk mempercayai bahwa masyarakat dapat melaksanakan kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Kriteria yang lebih spesifik harus dikembangkan dimana cadangan kebijakan dapat diurutkan dan dievaluasi dalam ketertarikan publik.

2. Keadilan

Keadilan merupakan suatu perlakuan yang tidak membedakan setiap orang dengan keadaan yang sama. Pada kenyataannya, masih terdapat orang yang tidak berada dalam keadaan yang sama pengakuan keadilan seringkali diberikan agar pembagian kembali sumber daya yang langka. Sebab kebutuhan serta kemampuan orang atau kelompok pasti berbeda, keadilan tidak mesti diartikan bahwa jumlah yang sama untuk barang dan jasa yang harus diberikan kepada setiap orang haruslah sama, akan tetapi jumlah yang akan diberikan harus adil.

3. Efisiensi

Efisiensi merupakan rasio input terhadap output. Input diartikan sebagai sumber daya yang akan diganti dengan adanya aktifitas yang masuk pada output kebijakan. Hasil yang bertentangan dengan tujuan serta mengutamakan hal yang beda dalam kelompok tertarik yang berbeda, efisiensi pada dasarnya tercapai dalam kebijakan pemerintah cenderung dalam sistem yang terbatas. Walaupun begitu, adanya kesulitan dalam pencapaian dalam lembaga pemerintah, efisiensi merupakan kriteria yang utama pada literature kebijakan publik.

4. Efektifitas

Adanya jangkauan suatu kebijakan dalam melakukan pencapaian sesuai tujuan merupakan kriteria lain yang dipergunakan untuk mengevaluasi cadangan kebijakan. Istilah lainnya yaitu rasio dari output yang sebenarnya dalam melakukan perencanaan output terhadap waktu. Hal ini tidak sama dengan efisiensi karena efektifitas berdampak pada sisi pencapaian mutlaknya sedangkan efisiensi berfokus pada seberapa banyak unit keluaran yang dicapai seseorang untuk unit inputnya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

5. Cukup

Cukup merupakan suatu pengukuran kebijakan untuk pencapaian hasil yang diinginkan dengan adanya manfaat sumber daya. Kriteria ini mempuntai beberapa variasi hubungan dengan sumber daya serta tujuan yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :

- a) Mencapai tujuan tertentu menggunakan biaya tertentu
- b) Mencapai salah satu dari banyaknya tujuan menggunakan biaya tetap
- c) Mencapai sasaran tertentu menggunakan biaya yang akan berubah
- d) Mencapai salah satu dari banyaknya tujuan menggunakan biaya yang akan berubah.

6. Terjawab

Terjawab dalam kriteria ini diartikan sebagai strategi kebijakan mampu mencukupi kebutuhan dari sebuah golongan serta mampu memberikan solusi bagi masalah yang ada masyarakat. Hal ini juga memiliki tujuan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan keadilan sosial bagi setiap rakyat Indonesia.

2.2 Pengertian Efektifitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai salah satu hal terpenting untuk mengetahui seberapa besar efek dari suatu organisasi dengan tujuan dari organisasi tersebut. Adapun efektivitas ini memiliki kaitan yang erat dengan upaya suatu lembaga atau organisasi yang dalam keberhasilannya mendapatkan serta

memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana demi mewujudkan adanya tujuan dari operasional, terlaksananya berbagai tugas pokok, mencapainya tujuan, waktu yang tepat sehingga terjadinya partisipasi yang aktif dari semua anggota dalam organisasi tersebut.

Adapun berbagai pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) mengenai efektivitas yang berawal dari kata efektif, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada efeknya (ada akibatnya, ada pengaruhnya, ada kesannya).
- b. Manjur atau mujarab.
- c. Dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan)

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Efektivitas memiliki arti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya, begitu pula sebaliknya (Agustina, 2020).

Mahmudi (2020) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar output dalam pencapaian tujuan maka organisasi, program atau kegiatan semakin efektif organisasi. Efektifitas dapat dinyatakan dalam suatu pekerjaan jika pekerjaan tersebut mampu terselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan target yang telah direncanakan. Dalam berbagai penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, memberikan penjelasan bahwa pada umumnya dalam melaksanakan sebuah program juga dapat dimayatakan suatu proses belajar untuk yang melaksanakannya sendiri. Dimana dalam perjalanan proses melaksanakan program tersebut sebaiknya perlu adanya peningkatan dalam hal kemampuan masyarakat serta dapat dipandang sebagai usaha dalam menyadarkan masyarakat.

Efektivitas dapat dikatakan sebagai gambaran sudah sejauh mana target bisa dicapai terlihat dari adanya kualitas yang dapat memadai. Kualitas tersebut dapat mempengaruhi hasil yang akan dicapai. Produktivitas dari setiap individu dapat menjadi perbandingan bagi efektivitas keluaran (pencapaian hasil kerja yang telah maksimal) kepada efisiensi salah satu yang menjadi masukan (tenaga kerja) yang berisi kuantitas serta kualitas dalam satuan waktu tertentu. Dapat dinyatakan bahwa pengukuran efektivitas dalam sebuah organisasi ataupun lembaga (Sedarmayanti, 2019) bisa dinyatakan dari berbagai kriteria berikut ini :

- a. Input.
- b. Proses.
- c. Hasil (output).

Program yang efektifitas, bias dinyatakan dalam melakukan perbandingan output dengan tujuan program tersebut, pendapat dari peserta yang ikut program bisa menjadi pengukuran dalam menentukan efektivitas program tersebut. Budiani (2017) telah menjelaskan bahwa dalam pengukuran faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam berjalan ataupun tidaknya sebuah program dapat dilaksanakan dengan memakai variabel-variabel berikut ini:

a. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program dapat diartikan sebagai pengukuran untuk mengetahui bagaimana peserta program yang telah dijalankan telah tepat pada sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program dapat diartikan sebagai pemberian informasi dari yang akan melaksanakan program kepada peserta yang akan ikut atau yang akan menjadi sasaran program sehingga mengerti tujuan dari program tersebut.

c. Tujuan Program

Tujuan program merupakan sudah sejauh mana kesesuaian yang telah ditetapkan dengan hasil yang diperoleh dengan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan program yang telah direncanakan diawal.

d. Pemantauan program

Pemantauan program adalah suatu kegiatan yang akan dijalankan ketika program tersebut telah dilaksanakan sebagai bukti kepedulian terhadap peserta program.

Bedasarkan berbagai penjelasan mengenai pengertian efektivitas diatas peneliti memiliki pendapat bahwa efektivitas adalah suatu ukuran dampak ataupun pengaruh merupakan suatu ukuran dalam tercapainya manfaat atau tujuan dari sebuah organisasi. Selain itu, efektivitas memiliki pengertian sebagai suatu proses pencapaian dari tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya dalam organisasi tersebut. Jika tujuan yang diharapkan merupakan tujuan dari sebuah instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut terjadi keberhasilan dalam pelaksanaan programnya ataupun kegiatannya menurut wewenang, tugas serta fungsi dari instansi tersebut.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) efektivitas diartikan sebagai pengukuran dari berhasilnya atau gagalnya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini organisasi untuk mencapai tujuannya, telah dinyatakan efektif. Aspek-aspek dalam efektivitas menggambarkan bagaimana hasil dari program untuk mencapai tujuan dari program. Adanya peningkatan kontribusi output yang merupakan hasil pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka akan semakin efektif proses kerja unit organisasi tersebut.

2.2.1. Ukuran Efektivitas

Dalam menentukan ukuran efektivitas program kegiatan tidaklah mudah. Efektivitas akan dilihat dari sudut yang tidak sama serta bergantung pada yang akan melakukan evaluasi yang kemudian akan menafsirkannya. Dalam sudut pandang produktivitas, pemimpin produksi akan menyampaikan penjelasan akan efektivitas yang berarti adanya kualitas dan kuantitas dalam produk.

Ukuran efektivitas dapat dilakukan pengukurannya dengan cara membandingkan rancanagn yang dibentuk dengan hasil yang btelah diperoleh. Namun, usaha serta hasil kerja dan adanya tindakan yang dilakukan tidak sesuai

dan tujuan serta hasil yang diharapkan tidak tercapai, maka dapat dikatakan belum efektif. Berikut ini 8 kriteria efektivitas untuk mencapai tujuan yaitu:

- a) Tercapainya suatu tujuan harus terlihat jelas, hal ini bermaksud supaya karyawan dalam melakukan tugasnya dapat mencapai target yang teratur dan rencana yang telah ditetapkan perusahaan dapat tercapai.
- b) Dalam mencapai tujuan perlunya strategi yang jelas, perlu dimengerti strategi yang dimaksud berarti ada yang akan dilewati dalam menjalankan berbagai upaya dalam mencapai tujuan yang dirancang agar yang melaksanakan tidak melakukan penyimpangan dalam mencapai ketetapan dari perusahaan.
- c) Adanya perumusan dari kebijakan serta melakukan analisis, dengan adanya tujuan yang akan dicapai dan adanya strategi yang telah dirancang yang artinya kebijakan akan menghubungkan tujuannya dengan upaya dalam pelaksanaan aktivitas selama beroperasi.
- d) Adanya kematangan dalam perencanaan, umumnya memiliki arti membentuk keputusan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan di masa yang akan datang.
- e) Penyusunan sebuah program yang tepat suatu perencanaan yang tepat akan membutuhkan penjabaran dalam program pelaksanaan yang tepat.
- f) Adanya penyediaan sarana dan prasarana saat kerja, salah satu yang menjadi aspek pendukung adanya kapasitas kerja yang dilakukan secara produktif.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, sebegus apapun suatu program jika dilakukan dengan tidak efektif dan tidak efisien akan menyebabkan perusahaan tersebut kesulitan dalam mencapai tujuannya.
- h) Pentingnya dalam pengawasan dan pengendalian memiliki karakter yang mendidik, hal ini sesuai dengan karakter manusia yang tidak sempurna maka efektivitas perusahaan mengharapkan perlunya pengawasan.

2.2.2 Faktor-faktor Efektifitas

Adapun beberapa faktor dari efektifitas menurut Hasibuan (2018:105) yaitu sebagai berikut :

1. Karakteristik Organisasi:
 - a. Struktur (Pembagian Tugas)

- b. Teknologi (Perlengkapan dan Fasilitas)
- 2. Karakteristik Lingkungan:
 - a. Ekstern (Hubungan dengan masyarakat)
 - b. Intern (Lingkungan kerja/Iklm kerja dalam organisasi)
- 3. Karakteristik Pekerja:
 - a. Produktivitas/Prestasi kerja serta adanya Motivasi dari pimpinan.
 - b. Keterikatan pada organisasi (adanya rasa keterikatan petugas melalui disiplin waktu)
- 4. Kebijakan dan praktek manajemen
 - a. Pengawasan
 - b. Evaluasi kerja

2.2.3 Indikator Efektifitas

Menurut Nadjidah (2019) menjelaskan 4 indikator yang mengukur efektivitas, yaitu:

1. Ketepatan perhitungan biaya
Ketepatan perhitungan biaya atau dapat disebut dengan anggaran dengan rinci membagi dengan tepat di setiap kegiatan ataupun usaha dengan melakukan pertimbangan biaya yang ada atau yang telah dimiliki organisasi.
2. Ketepatan berfikir
Ketepatan berfikir berhubungan secara rasional terhadap individu yang ada dalamnya, baik itu tentang strategi, bahkan sampai pengolahan dan tindakan yang sebaiknya dilakukan.
3. Ketepatan sasaran
Ketepatan sasaran berhubungan pada orang yang menjadi sasaran terbentuknya program tersebut dimana memastikan bahwa sasaran telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Ketepatan tujuan
Ketepatan tujuan berhubungan dengan adanya keefektifan suatu organisasi dapat mencapai tujuannya.

2.3 Pengertian Program

Program dapat diartikan sebagai sebuah isi kesimpulan dari pernyataan dari berbagai tujuan maupun keinginan yang mana hal ini saling terkait serta bergantung demi tercapainya sebuah tujuan yang sama. Pada umumnya suatu program mempunyai keseluruhan kegiatan yang ada dalam unit administrasi yang sama, ataupun sasaran-sasarannya yang saling bergantung serta saling mencukupi. Pada dasarnya program sering dikaitkan dalam sebuah perencanaan, persiapan, dan desain ataupun rancangan. Kata desain yang diambil dari bahasa Inggris berasal dari kata *decine*. Dalam hal ini desain untuk perspektif dalam pembelajaran merupakan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sering dinyatakan dengan kalimat program pembelajaran. Beragam pengertian dari desain saling memiliki arti yang berbeda antara satu dengan yang lainnya seperti pada kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa desain artinya kerangka, persiapan ataupun rancangan (Azlan Suhaini 2019 : 23).

2.3.1 Program Kampung KB

Pada buku *Pentunjuk Teknis Kampung KB 2018* menyatakan bahwa Kampung KB merupakan satuan wilayah yang setingkat RW, dusun ataupun setaranya, dimana mempunyai kriteria tertentu, serta adanya keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta pembangunan sektor yang dalam pelaksanaannya berhubunga secara sistemik maupun sistematis. Program Kampung KB dibentuk, setelah itu dilaksanakan serta kemudian dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintahan maupun pemerintahan daerah, lembaga bukan pemerintahan serta swasta memiliki peran untuk memfasilitasi, mendampingi serta membina.

Adapun yang namanya sasaran kegiatan dalam hal ini yang menjadi subyek serta obyek untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam Program Kampung KB diluar dari keluarga. Dalam hal ini PUS, lansia, serta remaja maupun keluarga yang mempunyai balita, keluarga yang mempunyai remaja serta keluarga yang

mempunyai lansia. Selanjutnya untuk sasaran sektoral dilihat sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang dalam melaksanakannya merupakan Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.

Beberapa program yang dapat dilaksanakan dalam Kampung KB meliputi:

1. Pendidikan dan Penyuluhan

Memberikan informasi mengenai pentingnya berencana keluarga, cara menerapkan metode kontrasepsi yang aman dan efektif, serta pentingnya peran kesehatan reproduksi bagi keluarga.

2. Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Menyediakan akses dan informasi mengenai layanan kesehatan reproduksi seperti pemeriksaan kesehatan reproduksi, pelayanan KB, dan layanan konseling terkait kesehatan reproduksi.

3. Dukungan Kesejahteraan Keluarga

Memberikan bantuan atau dukungan bagi keluarga dalam hal perencanaan keuangan, pendidikan anak, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

2.3.2. Tujuan Pembentukan Program Kampung KB

Pada buku Petunjuk Teknis Kampung KB 2018 menjelaskan berbagai tujuan dilakukannya pembentukan Program Kampung KB :

- a. Tujuan Umum

Agar kualitas hidup dari masyarakat lebih meningkatkan khususnya setingkat kampung ataupun yang setara dengan adanya program kependudukan, keluarga berencana maupun pembangunan keluarga juga pembangunan sektor terkait demi terwujudnya keluarga kecil yang memiliki kualitas.

- b. Tujuan Khusus

- a) Peran pemerintah yang semakin meningkatkan seperti pemerintah daerah, lembaga yang bukan pemerintah serta swasta untuk dapat memberikan fasilitas, pendampingan maupun pembinaan kepada masyarakat dalam

menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait.

- b) Kesadaran dari masyarakat yang semakin meningkatkan dalam pembangunan berwawasan kependudukan.
- c) Jumlah akseptor yang akan semakin meningkatkan.
- d) Terjadinya peningkatan ketahanan dari setiap keluarga dengan adanya program misalnya, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja.
- e) Kelompok UPPKS dapat meningkatkan pemberdayaan dalam keluarga.
- f) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akan semakin menurun.
- g) Dapat memicu peningkatan dalam kesehatan masyarakat.
- h) Peningkatan dalam hal rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah.
- i) Saran serta prasarana dalam pembangunan kampung akan meningkat.
- j) Semakin terciptanya lingkungan kampung yang sehat serta bersih.
- k) Peningkatan keimanan yang berkualitas bagi remaja maupun mahasiswa untuk kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) dalam kelompok PIK KRR/remaja.
- l) Cinta tanah air serta rasa kebangsaan yang ada pada remaja maupun mahasiswa dengan adanya kegiatan social serta budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) dalam kelompok PIK KRR maupun mahasiswa dan seterusnya.

2.3.3 Indikator Pelaksanaan Program Kampung KB

Dalam Tachjan (2019:28) menjelaskan tentang indikator dari pelaksanaan program kampung keluarga berencana, yaitu:

1. Partisipasi

Tingginya partisipasi seluruh masyarakat untuk kemajuan kampung KB

2. Pelaksanaan kegiatan

Beragamnya kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu baik program pemerintah maupun inovasi dari masyarakat

3. Anggaran

Besarnya sumber anggaran kampung KB yang didapat baik dari iuran masyarakat, bantuan pemerintah maupun donatur yang tidak mengikat

4. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya program kampung KB

5. Keluarga sehat dan sejahtera

Tercapainya keluarga yang sehat dan sejahtera

6. Pengetahuan

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan yang diterima oleh masyarakat

2.3.4 Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kampung KB

Berikut faktor-faktor penghambat pelaksanaan program kampung keluarga berencana menurut Steers dalam (Apriza, 2020) :

1. Pemahaman masyarakat

Masyarakat yang kurang memahami konsep berkeluarga dan program KB.

2. Kurangnya upaya KIE (Komunikasi, Edukasi dan Informasi)

Kurangnya upaya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada peserta KB tentang pelayanan kontrasepsi.

3. Kurangnya tenaga manusia

Kurangnya tenaga manusia dapat menyebabkan tidak adanya penyedia layanan di Pusat Kesehatan.

4. Jarak yang jauh

Jarak yang jauh ke Pusat Kesehatan tempat layanan KB diberikan.

5. Kurangnya dukungan data dasar

Kurangnya dukungan data dasar yang diperoleh PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) dalam menyusun peta kerja.

6. Kurangnya pendataan keluarga

Kurangnya pendataan keluarga secara berkala dan pencatatan rutin data KB.

7. Kurangnya hubungan masyarakat
Kurangnya hubungan masyarakat dengan Pusat yang menyediakan keluarga berencana.
8. Efek samping alat kontrasepsi
Efek samping yang sering dikaitkan dengan penggunaan alat kontrasepsi hormonal.
9. Persepsi budaya
Persepsi budaya masyarakat yang tidak perlu menggunakan KB

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nurjanah (2019)	Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makassar	Dalam penelitiannya menyatakan bahwa masih terdapat masyarakat dengan alasan yang beragam yang tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi walaupun sudah mengetahui manfaat untuk ikut berpartisipasi dari program tersebut. Namun program keluarga berencana di Kecamatan Kota Makassar cukup efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.
2.	Lathifatu N (2018)	Efektivitas Program Kampung KB (Keluarga Berencana) dalam	Kesimpulan dari hasil penelitiannya menjaaskan bahwa Program kampung KB yang telah dilaksanakan dapat memberikan

		Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta	berpengaruh baik untuk kesejahteraan pada masyarakat, beberapa masalah sudah dapat diatasi, bermula kampung kumuh menjadi bersih terawat sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.
3.	Anisa (2021)	Efektifitas Program Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pasca Banjir Bandang di Kab.Luwu Utara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemerintah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup.
4.	Deni Edo Pratama (2021)	Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Kemuning Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan	Penelitian ini menjelaskan bahwa Program Kampung KB di Kelurahan Kemuning Kota Banjarbaru yang telah dijalankan dapat dikatakan sudah efektif akan tetapi belum sesuai dengan hasil yang diinginkan yaitu adanya pencapaian suatu progres Kampung KB paripurna disebabkan masih ada beberapa program kerja yang belum terlakukan dikarenakan beberapa hambatan.
5.	Reki Radeswandri	Efektivitas Program Kampung	Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dibentuknya

	(2021)	KB Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Desa Pulau Aro	suatu program Kampung KB ini yang dilaksanakan dengan baik dapat memicu suatu efek yang positif pada masyarakat serta juga dapat memicu kehidupan masyarakat yang berubah seperti dari sudut pandang ekonomi, sosial, keagamaan dan juga yang lainnya. Namun pada kenyataannya yang ditemukan oleh peneliti tidak sesuai dengan yang tujuan sebelumnya.
6.	Maxmilianus Wilfridus Keytimu (2019)	Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengurangi Kemiskinan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2019 (Studi Kasus Di Desa Wolomapa Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka)	Hasil penelitian menunjukkan Program Keluarga Harapan yang bersifat memberikan bantuan langsung tunai pada masyarakat, guna untuk meningkatkan kualitas hidup melalui akses pendidikan dan kesehatan. Program PKH bisa mempengaruhi perilaku atau keadaan Rumah Tangga Sangat Miskin di Desa Wolomapa. Mempengaruhi dalam hal ini adalah PKH bisa membantu masyarakat atau meringankan beban masyarakat dalam membiayai anak-anak mereka baik dalam bidang kesehatan maupun bidang pendidikan dan

			membantu para lansia dalam memenuhi kebutuhan mereka
7.	Dompak & Riyanda (2018)	Analisis Efektivitas Kebijakan dan Program Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam Terhadap Peningkatan Persentase Pelaksanaan Amdal	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa karena kesadaran yang masih kurang serta masih ada investor yang bertindak nakal, sehingga dalam pelaksanaannya masih belum efektif di daerah pantai. Beberapa komponen berkontribusi pada peningkatan persentase AMDAL: meningkatnya kebutuhan investor dalam kontribusi perusahaan serta sosialisasi yang lebih baik, adanya hukum akan kesadaran publik.
8.	Masruri M.IP Dan Imam Muazansyah (2018)	Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan dan standar, maka akan berpengaruh pada penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan. Pemberian informasi serta fasilitas merupakan komponen pendukung yang dimaksud. Informasi ini mencakup peraturan, instruksi operasional.

9.	Gilbert Johanis Siby (2024)	Efektivitas Program Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Madidir Kota Bitung	Dalam kaitannya dengan pencapaian program, pencapaian tersebut dapat tercapai apabila adanya perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi yang terlaksana sehingga masyarakat nelayan di kecamatan madidir dapat memperoleh bantuan kartu Kusuka hingga saat ini.
10.	Selestinus Narsan (2022)	Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera Di Desa Golo Meleng Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur.	Program Kampung Keluarga Berencana di desa Golo Meleng dapat disimpulkan kurang efektif dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat desa Golo Meleng masih rendah dan rendahnya kualitas SDM disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa Golo Meleng seperti fasilitas alat kesehatan penunjang KB sudah lengkap Namun yang menjadi kekurangannya adalah keadaan pustu yang belum direnovasi.

2.4 Kerangka Pemikiran

